



CISDI, PKJS UI, dan Komnas PT Luncurkan Bungai Rampai Hasil Riset Pengendalian Tembakau, Tuntut Pemerintah Serius Kendalikan Rokok

Jakarta, 2 November 2021 – Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk *Tapak Tilas: 1.095 Hari Advokasi Harga Rokok di Indonesia* untuk mendorong kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) demi menekan konsumsi rokok.

Acara ini merupakan bagian gerakan *Pulih Kembali 2.0: Sisihkan Uang yang Kamu Bakar untuk Mereka yang Sedang Berjuang* yang berlangsung sejak Agustus 2021 lalu. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kerugian yang ditimbulkan konsumsi rokok sepanjang pandemi COVID-19.

“Temuan riset CISDI, PKJS UI, dan Komnas PT menyebut pandemi COVID-19 tidak menjadi dorongan seseorang untuk berhenti merokok,” ujar Krisna Puji, dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI mewakili ketiga lembaga. Kajian akademik utama dari CISDI, PKJS UI, Komnas PT, dan jejaring lainnya menemukan catatan-catatan berikut:

1. Perilaku merokok tidak berubah selama pandemi

- **49,8%** masyarakat tetap membeli rokok seperti sebelum pandemi (Survei Komnas PT, 2021)
- **47,6%** masyarakat mempertahankan konsumsi rokok selama pandemi (Survei FK UI, 2021)
- **60%** masyarakat mengeluarkan uang belanja rokok selama pandemi (Survei CISDI, 2021)
- **Tidak ada perubahan** intensitas maupun kuantitas merokok suami saat pandemi (Riset PKJS UI, 2021)

2. Harga rokok murah jadi alasan tidak berubahnya konsumsi

- 42% perokok persisten mengakui alami penurunan pengeluaran untuk membeli rokok, namun 24%-nya beralih ke rokok murah (Survei CISDI, 2021)
- Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap merokok di masa pandemi, meski situasi ekonomi sulit dan cenderung beralih ke rokok yang lebih murah (PKJS UI, 2021)
- **Rp70.000** per bungkus adalah harga untuk membuat perokok berpikir berhenti merokok (PKJS UI, 2018)

3. Konsumsi rokok yang tinggi membebani perekonomian

- 446,73 triliun rupiah atau setara 2,9% pendapatan nasional bruto adalah beban ekonomi langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*) akibat rokok (CISDI, *forthcoming*)

“Hasil wawancara survei dan riset ini menunjukkan mereka yang mengurangi pengeluaran konsumsi rokok beralasan untuk berhemat. Ini menunjukkan harga rokok mempengaruhi perilaku merokok mereka,” ujar Krisna kembali.

Menanggapi paparan, **Perwakilan Dirjen Bea dan Cukai Akbar** menyebut, “Kita berpegangan dalam menentukan tarif cukai melalui 4 pilar, yaitu pengendalian konsumsi, ketenagakerjaan, rokok ilegal, dan penerimaan negara.”



Berbeda dengan Akbar, **Ekonom Senior Faisal Basri** menyebut kesehatan masyarakat perlu dikedepankan dalam pengendalian tembakau. “Kita melihat kebijakan pemerintah mengendalikan tembakau belum efektif. Kita harus lebih sungguh-sungguh seperti hadapi *climate change*. Kita ingin ada kebijakan *extraordinary* yang tidak pakai pilar atau keseimbangan (untuk industri rokok), ujanya.”

Pengamat publik sekaligus **Inisiator Drone Emprit Ismail Fahmi** menyebut narasi menaikkan harga rokok lebih populer di media sosial beberapa waktu lalu dibanding yang menolak. “Percakapan harga rokok harus naik lebih dominan di media sosial. (Percakapan) menolak harga rokok naik ada, namun tidak dominan. Tujuh *tweet* teratas mengenai tema ini mendukung kenaikan harga rokok,” ujanya.

CISDI, PKJS UI, dan Komnas PT mendorong pemerintah menguatkan upaya pengendalian tembakau. Adapun rekomendasi dibagi dalam dua jenis, fiskal dan non fiskal.

Rekomendasi fiskal mencakup (1) simplifikasi tarif golongan cukai, (2) mahalkan harga rokok (melalui kenaikan cukai), (3) tingkatan efektivitas DBH CHT.

Rekomendasi non-fiskal mencakup (1) perbesaran peringatan bergambar, (2) edukasi hidup sehat tanpa rokok, (3) dorong pemerintah daerah terapkan KTR.

“Meningkatkan harga rokok menjadi hal penting untuk menyelamatkan kelompok masyarakat yang tidak bisa berhenti merokok dan menjaga stabilitas keuangan negara di tengah krisis pandemi,” jelas Krisna menutup diskusi.

-
1. Unduh berbagai laporan riset CISDI [di sini](#)

-SELESAI-

Tentang Komnas PT

Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli akan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin. Info: <https://komnaspt.or.id/>

Tentang CISDI

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI): Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah *think tank* yang mendorong kebijakan kesehatan berbasis bukti untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, sehat, dan sejahtera dengan menerapkan paradigma sehat. CISDI melaksanakan riset dan manajemen program serta advokasi kebijakan untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata. Info: <https://cisdi.org/id/>

Tentang PKJS UI

Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (PKJS-UI) adalah institusi yang bergerak pada pelatihan, konsultasi, dan penelitian seputar Jaminan Sosial secara luas termasuk menangani isu ekonomi dan kesehatan, untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Info: <https://pkjsui.org/>